



Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-
Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III,
Lt. 4Jl. Jend. Gatot
Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdprri](https://twitter.com/bksapdprri)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP_DPR_RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,
silakan menghubungi Biro
KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

DPR RI Mendorong *Engagement* dalam Menghadapi Tantangan Regional dan Memperkuat Kerja Sama Ekonomi Hijau dan Biodiversitas untuk Pembangunan Inklusif

Bangkok 26/10/2022 - Ketua DPR-RI Dr (HC) Puan Maharani memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tahunan Parlemen negara-negara Asia-Pasifik (*Asia-Pacific Parliamentary Forum/ APPF*) yang bertempat di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan yang berlangsung dari tanggal 26 - 28 Oktober 2022 tersebut, Delegasi Indonesia membawa misi untuk mensukseskan dua usulan resolusi. Resolusi yang pertama berjudul *Parliament and the Post COVID-19 Sustainable Recovery to Promote Democracy, Peace and Security*. Sedangkan resolusi yang kedua berjudul *Promoting Biodiversity and Green Economy for Inclusive Development*. Kedua resolusi usulan Indonesia tersebut mendapatkan dukungan penuh dari delegasi sejumlah negara yang hadir antara lain; Kanada, Australia, Chile, Mexico, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang dan Thailand sebagai tuan rumah.

Dalam menghadapi kemungkinan krisis di masa yang akan datang, Ketua DPR-RI pada sesi Sidang Pleno *Women Parliamentarians* menegaskan pentingnya penguatan perempuan melalui pemerataan pendidikan, literasi digital, akses permodalan, serta kewirausahaan perempuan. Menurutnya, perempuan harus menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan global yang semakin beragam. Sedangkan pada sesi Sidang Pleno *Politic and Security*, Politisi PDI-P itu menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, terutama dalam kerangka *Human Security* yang dewasa ini semakin mengemuka.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dari Fraksi Gerindra Dr. Fadli Zon, yang juga merupakan Delegasi Indonesia pada pertemuan tahunan APPF menegaskan pada *Working Group Politic and Security* bahwa kendati tantangan global seperti perang antara Russia-Ukraina semakin membawa dampak luas, tantangan regional tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, sebaiknya delegasi negara-negara yang hadir fokus pada bagaimana mempererat kerja sama dalam menghadapi tantangan regional tersebut, ketimbang menjadikan forum APPF sebagai wadah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. "Bagaimanapun, jika kita memang menginginkan perdamaian, engagement lebih baik daripada mengucilkan. Dengan engagement kita bisa mendorong negosiasi." Demikian disampaikan oleh Politisi Gerindra itu.

Delegasi Indonesia juga berkesempatan memimpin pertemuan Sub Regional Group negara-negara Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat) mendorong perubahan mekanisme pemilihan ketua Group, serta mekanisme keanggotaan pada Executive Committee yang semula 4 tahun menjadi 2 tahun. Usulan perubahan tersebut mendapat tanggapan positif dari mayoritas negara-negara Asia Tenggara yang hadir. Untuk selanjutnya usulan tersebut akan diajukan pada *Executive Committee* untuk menjadi pertimbangan. Usulan dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi anggota *Executive Committee*.

Pada kesempatan itu, Delegasi DPR RI juga menggalang dukungan parlemen negara-negara Asia Pasifik untuk memperkuat kerjasama ekonomi hijau dan konservasi biodiversitas melalui Resolusi berjudul *Promoting Biodiversity and Green Economy for Inclusive Development*. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan dari peserta sidang di *Working Group on Economic and Trade Matters*. Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengampai bahwa Indonesia terus mengupayakan transisi menuju ekonomi hijau yang berkaitan erat dengan proses pemulihan paska pandemi.

Rangkaian Pertemuan Tahunan APPF yang dihadiri oleh 20an negara tersebut ditutup dengan penandatanganan *Joint Communiqué* oleh seluruh perwakilan delegasi anggota APPF. Di akhir acara juga dilakukan serahterima keketuaan dari Thailand ke Filipina yang akan menjadi tuan rumah tahun 2023 mendatang.